

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA DESA DI DESA KALISIDI KABUPATEN SEMARANG¹

Oleh :

Amari Shofi Maulani Oktavia²

Departemen Politik Dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Abstrak

Masyarakat menjadi komponen penting untuk terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa tersebut. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan desa, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat secara aktif juga dimaksudkan sebagai kekuatan kontrol atas kebijakan yang diambil pemerintah, sehingga yang terjadi adalah sinergi antara sumber daya lokal, kekuatan politik pemerintah, dan sumberdaya modal dari investor luar.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa indepth interview, participant observation dan documentation (Moleong, 1991). Metode Participatory Poverty Assessment (PPA) dan Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat dan stakeholder lain. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan aksi-aksi yang berkelanjutan.

Kesimpulan yang didapat, Di Desa Kalisidi sudah mengoptimalkan semua sumber daya Pemerintah Desa, masyarakat, dan Lembaga Desa untuk terlibat dalam pengelolaan anggaran dana desa walaupun disadari oleh pemerintah desa masih banyak kekuarangan yang belum tercapai.

Kata kunci : Partisipasi Masyarakat

¹ Skripsi penulis

² Mahasiswa Fisip Undip

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE MANAGEMENT AND USE OF VILLAGE
FUNDS IN KALISIDI VILLAGE, SEMARANG DISTRICT

By :

Amari Shofi Maulani Oktavia

Departemen Politik Dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Abstract

The community is an important component to be involved in the management and utilization of village funds. Community participation is the involvement of community members in village development, including activities in the planning and implementation of development programs/projects carried out within the local community. Active community participation is also intended as a power control over the policies taken by the government, so that what happens is a synergy between local resources, government political power, and resource capital from outside investors.

This study used data collection techniques in the form of in-depth interviews, participant observation and documentation (Moleong, 1991). The Participatory Poverty Assessment (PPA) and Focus Group Discussion (FGD) methods are used to accommodate the aspirations of the community and other stakeholders. This method is very well used to develop community participation in planning and carrying out sustainable actions.

The conclusion obtained, in Kalisidi Village, has optimized all the resources of the Village Government, community, and Village Institutions to be involved in managing the village fund budget, although it is realized by the village government that there are still many deficiencies that have not been achieved.

Keywords: Community Participation

A. Pendahuluan

Sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, desa mempunyai peran strategis dalam peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Komitmen ini kemudian diwujudkan dengan diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi dan kewenangan kepada desa untuk membuat kebijakan-kebijakan³, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Dalam program ini, penguatan otonomi desa dilakukan melalui pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang diatur dan dikelola oleh masyarakat desa sendiri. Selain peran serta partisipasi masyarakat, SDM aparatur desa, organisasi desa dan masyarakat merupakan salah satu faktor dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa. Hal ini dapat berpengaruh dalam perencanaan yang berimbas pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Pada permasalahan tersebut, dalam penyelesaian masalah yang ada, diperlukan kerjasama dan peran semua pihak dalam penanggulangan permasalahan yang disebabkan oleh ke tidak siapan desa dalam mengelola anggaran dana desa. Selain itu, kontrol masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa juga merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk menjadikan desa menjadi sejahtera. Masyarakat menjadi komponen penting untuk terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa tersebut. Hanya saja dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa hambatan yang dapat menjadi batu sandungan bagi pengelolaan dana desa tersebut. Pemahaman, kesadaran, partisipasi masyarakat merupakan kendala utama dalam pelaksanaannya, seperti yang terjadi di Desa Kalisidi Kabupaten Semarang. Secara umum pelaksanaan program dana desa masih belum melibatkan seluruh komponen masyarakat.

B. Kerangka Teori

1. Partisipasi

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan atau kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan.

Ada 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting.

Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi

³ UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi dan kewenangan kepada desa untuk membuat kebijakan-kebijakan.

mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Berbagai usaha untuk mencapai proyek-proyek di negara berkembang menunjukkan bahwa bantuan masyarakat akan sulit diharapkan apabila mereka tidak diikutsertakan, alasan ketiga, partisipasi menjadi urgent karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat. dapat disimpulkan bahwa partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan maupun pemberdayaan sangat diperlukan, karena nantinya masyarakat itu sendiri yang akan menjalankan pembangunan maupun pemberdayaan itu sendiri.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa indepth interview, participant observation dan documentation. Metode Participatory Poverty Assessment (PPA) dan Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat dan stakeholder lain. Metode ini sangat baik digunakan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan aksi-aksi yang berkelanjutan. Teknik Pengolahan dan Analisis Data dalam penelitian ini, data akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sementara proses analisisnya menggunakan model analisis interaktif yang melalui proses berikut: data yang terkumpul direduksi berupa pokok-pokok temuan penelitian yang relevan dengan bahan penulisan, dan selanjutnya disajikan secara naratif. Reduksi dan penyajian data adalah dua komponen analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, disajikan, dideskripsikan dan kemudian diberi pemaknaan dengan interpretasi logis.

D. Pembahasan

Pada pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa, pemerintah desa telah melakukan transparansi dengan program serta anggaran pengelolaan dana desa. Setelah ditetapkan program desa, maka dalam melaksanakan program tersebut pemerintah desa menyerahkan kepada TPK/ Pokmas untuk melaksanakan di setiap dusun. TPK merupakan perwakilan masyarakat untuk melaksanakan program desa. Dengan

adanya tim pelaksana di dusun, maka dalam pelaksanaan anggaran dana desa pemerintah desa tidak ikut campur. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa kepala dusun bertugas sebagai pendamping dalam mengelola anggaran dana desa seperti kebutuhan pembangunan, pelaksanaan program dan pelaporan. Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa bertujuan untuk menanggulangi kendala dan permasalahan di desa, sehingga dalam pelaksanaan evaluasi, yang menjadi keinginan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa dapat terlaksana yaitu masyarakat mempunyai tingkat penyerapan yang tinggi supaya dalam melaksanakan program-program desa masyarakat tidak melenceng dari prioritas yang ada, begitu pula tingkat penyerapan yang diberikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap aparatur desa supaya dapat mengarahkan masyarakat dalam melaksanakan program-program desa.

Dengan terlaksananya pengelolaan anggaran dana desa maka peran serta partisipasi masyarakat sangatlah penting. Di Desa Kalisidi partisipasi masyarakat yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sehingga dalam pengelolaan anggaran dana desa masyarakat ikut terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran dana desa.

E. Kesimpulan dan Saran

Di Desa Kalisidi sudah mengoptimalkan semua sumber daya Pemerintah Desa, masyarakat, dan Lembaga Desa untuk terlibat dalam pengelolaan anggaran dana desa walaupun disadari oleh pemerintah desa masih banyak kekuangan yang belum tercapai. Pada pengelolaan anggaran dana desa peran pemerintah kalisidi yaitu menetapkan perencanaan untuk merealisasikan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan melaksanakan evaluasi supaya dalam pengelolaan anggaran dana desa pemerintah dapat mengerti permasalahan yang dihadapi.

Perangkat Desa beserta aparatnya sudah menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi masyarakatnya sehingga cukup berhasil dalam menyelesaikan salah satu pembangunan.

Meskipun begitu, masih diperlukan untuk lebih meningkatkan kesiapan dalam pengelolaan anggaran dana desa, sehingga dapat meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan dilingkup desa dengan cara mengelola anggaran dana desa dengan baik. Kepada masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi (swadaya) dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan.